

Analisis Proses Formulasi Kebijakan Smart City di Kota Magelang Periode 2017-2019

Analysis of the Smart City Policy Formulation Process in Magelang City, 2017-2019

Sinta Silfiani

sinta.silfiani@gmail.com

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Info Article

| Submitted: 1 January 2026 | Revised: 11 March 2026 | Accepted: 19 June 2026

| Published: 19 June 2026

How to Cite : Sinta Silfiani, "Analisis Proses Formulasi Kebijakan Smart City di Kota Magelang Periode 2017-2019", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 180-199.

ABSTRACT

This study examines the policy formulation process in the development of Smart City innovation implemented by the Magelang City Government during the 2017-2019 period, as well as mapping the stages involved in the formulation of Smart City policies as a form of governmental innovation. This research employs a qualitative approach, with the Smart City policy of Magelang City serving as the main object of analysis. The findings show that the formulation of Smart City policies in Magelang follows four main stages : problem identification, policy agenda setting, selection of policy alternatives, and policy decision-making. The formulation process involves multiple actors and stakeholders from various sectors. Nevertheless, in practice, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Magelang City plays a dominant role and exercises significant control across almost all stages of policy formulation. Due to the highly centralized coordination under Bappeda, the resulting Smart City policies tend to be state-centric, with limited direct participation from the wider community. As a consequence, the public is positioned more as the object rather than an active subject of policy, reflecting a Smart City approach that prioritizes technological aspects (smart technology). Focus Group Discussions (FGDs) are utilized as a mechanism to reconcile differing interests among actors and to achieve consensus. Furthermore, the analysis of actors' roles and interests indicates that those involved in formulation of Smart City policies in Magelang City can be categorized into state actors and non-state actors, which include supporting stakeholders and informal community groups.

Keyword: Public Policy, Smart City, Public Policy Formulation, Public Policy Actors.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan smart city di Kota Magelang pada periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Smart City di Kota Magelang berlangsung melalui empat tahapan utama, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, perumusan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Temuan penelitian juga mengungkapkan peran dominan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai aktor utama dalam proses formulasi, sementara keterlibatan aktor non negara dan partisipasi publik relatif terbatas. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi kebijakan publik dan smart city dengan menunjukkan bahwa implementasi konsep smart city di tingkat lokal cenderung masih bersifat state centric, dimana proses formulasi kebijakan lebih didominasi oleh aktor pemerintah dibandingkan dengan mekanisme kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan non negara. Temuan ini memperkaya diskursus mengenai tata kelola smart city dengan menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas smart city sebagai pendekatan kolaboratif dan praktik formulasi kebijakan masih hierarkis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman empiris mengenai smart city di Kota Magelang, namun juga memberikan implikasi konseptual bagi pengembangan model formulasi kebijakan smart city yang lebih partisipatif dan inklusif.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Smart City, Formulasi Kebijakan Publik, Aktor Kebijakan Publik.

Pendahuluan

Saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan perubahan di beberapa sektor sebagai langkah dalam mengatasi tuntutan zaman dan masyarakat yang semakin kompleks. Inovasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah dan untuk pelayanan publik. Salah satu kebijakan tren saat ini untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan masyarakat kota yang modern berbasis teknologi digital adalah kebijakan mengenai Smart City. Meijer & Bolivar (2015) mengatakan bahwa konsep mengenai Smart City dibagi dalam tiga tipikal ideal yaitu Smart City sebagai kota yang menggunakan Smart Technology (fokus teknologi), Smart City sebagai kota dengan orang-orang pintar (Smart People) yang fokus pada sumber daya manusia, dan Smart City sebagai kota dengan kolaborasi lintas pemerintah yang cerdas (governance focus). Kota Magelang menjadi salah satu di antara sejumlah kota di Indonesia yang menjadi finalis penilaian penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia 2017 untuk kategori kota kecil. Marshall dan Gerstl-Pepin (2005) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu hasil interaksi dari berbagai aktor kebijakan yang masing-masing memiliki sumber pengaruh dan menggunakan sumber daya.

Beberapa penelitian mengenai smart city di Indonesia umumnya berfokus pada aspek implementasi kebijakan, efektivitas program dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis proses formulasi kebijakan smart city terutama terkait dinamika aktor dan relasi kekuasaan dalam tahap perumusannya masih relatif terbatas. Padahal, tahap formulasi merupakan fase yang krusial dalam menentukan arah kebijakan. Studi sebelumnya lebih menitikberatkan pada implementasi, penelitian ini menempatkan proses formulasi kebijakan sebagai fokus utama analisis. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur smart city dari perspektif proses kebijakan, khususnya dalam konteks pemerintah daerah.

Rumusan Masalah dan Tujuan penelitian ini yaitu, Bagaimana Proses Formulasi Kebijakan Smart City sebagai Inovasi dari Pemerintah Kota Magelang dalam Periode 2017-2019? Dan Tujuan Penelitian ini Untuk mengidentifikasi proses formulasi kebijakan Smart City sebagai inovasi dari Pemerintah Kota Magelang dalam periode 2017-2019

Beberapa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan dibagi menjadi tiga, yaitu state, private, dan society. Widharetno (2017) dalam skripsinya mengatakan pemerintah harus menjadi Smart Government yang berperan sebagai implementer Smart City sehingga dapat dengan mudah membangun masyarakat menjadi Smart People. Penerapan good governance melalui teknologi aplikasi dalam Smart City dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance (Indrayana, 2016). Rahmadania (2018) dalam skripsinya mengatakan implementasi kebijakan

smart government di Kota Bandung menunjukkan adanya dampak yang positif bagi target groups (kelompok sasaran).

Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai kebijakan Smart City dalam implementasinya, namun proses-proses formulasi kebijakan Smart City masih belum ada yang mengkaji lebih dalam. Penelitian ini berusaha mengkaji aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan Smart City yang sangat mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan. Tahapan-tahapan proses formulasi kebijakan dalam dimensi politis dengan segala dinamikanya, berbagai kepentingan dari aktor perumus kebijakan serta peran dari masing-masing aktor juga belum ada penelitian yang mengkaji lebih dalam.

Kerangka Teori

a. Smart City Sebagai Inovasi Kebijakan

Penelitian ini mencoba mengkaji konsep Smart City menurut pemikiran Meijer & Bolivar (2015) yang mengatakan bahwa konsep mengenai Smart City dibagi dalam tiga tipikal ideal yaitu Smart City sebagai Smart Technology (fokus teknologi), Smart City sebagai Smart People berfokus pada sumber daya manusia, dan Smart City sebagai governance focus.

b. Formulasi Kebijakan

Penelitian ini merujuk pada kerangka pemikiran oleh Winarno (2014 : 123-126) yang menjelaskan bahwa proses formulasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap pertama, perumusan masalah (defining problem), tahap paling mendasar dan krusial dalam keseluruhan proses perumusan kebijakan
2. Tahap kedua, agenda kebijakan, yang mana tidak semua persoalan publik dapat dimasukkan dalam agenda kebijakan, namun diseleksi dari tingkat urgensi penanganannya.
3. Tahap ketiga, pemilihan alternatif kebijakan, menghasilkan beberapa opsi kebijakan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi
4. Tahap keempat, penetapan kebijakan, tahap akhir dalam proses formulasi kebijakan yang selanjutnya dijadikan peraturan perundang-undangan.

c. Aktor dalam Formulasi Kebijakan Publik

Penelitian ini menggunakan teori yang digagas oleh Moore (dalam Anggara, 2014: 187) yang membagi aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik menjadi tiga yaitu : aktor state, aktor privat, dan aktor masyarakat (civil society).

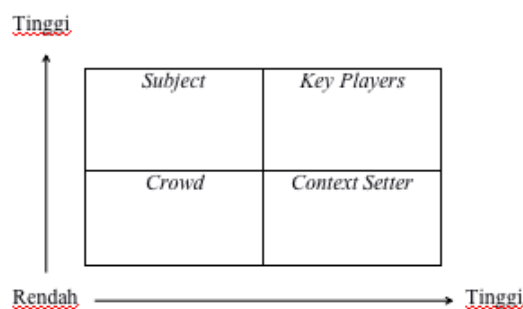
d. Teknik Pemetaan Stakeholders

Penelitian ini menggunakan klasifikasi stakeholders yang dikemukakan oleh Maryono et al. dalam Latupapua (2015: 25) antara lain :

1. Stakeholders primer, pihak yang terdampak secara langsung, baik secara positif atau negatif dan memiliki kepentingan langsung
2. Stakeholders kunci, pihak yang memiliki kewenangan, kepentingan dan pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan
3. Stakeholders sekunder, pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung, namun menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap proses pengembangan
4. Stakeholders pendukung, pihak yang berperan sebagai fasilitator dalam proses pengembangan dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan

Dalam menganalisis hubungan antar stakeholders, penelitian ini menggunakan teknik pemetaan stakeholders yang dikemukakan oleh Eden dan Ackermann dalam Bryson (2004: 15) yaitu pemetaan *power vs interest grid*.

Kuadran Analisis Power Versus Interest Grid



Sumber : Bryson, (2004)

Keterangan :

Subjects merupakan stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, namun pengaruh rendah. Key players adalah stakeholders yang mempunyai kepentingan sekaligus pengaruh yang tinggi. Contest setter merujuk pada stakeholders dengan tingkat pengaruh besar, tapi kepentingannya relatif rendah. Sementara itu, crowd adalah stakeholders yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang sama-sama rendah terhadap capaian yang diharapkan.

1. Policy creator, yaitu pihak yang berwenang menetapkan kebijakan
2. Koordinator, berperan dalam mengkoordinasikan stakeholders lainnya
3. Fasilitator, pihak yang menyediakan serta memfasilitasi kebutuhan kelompok sasaran
4. Implementer, pihak yang melaksanakan kebijakan, termasuk kelompok sasaran itu sendiri
5. Akselerator, pihak yang memberikan kontribusi untuk mempercepat pelaksanaan program agar berjalan sesuai atau melampaui target yang ditetapkan.

Kerangka Pikir



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses formulasi kebijakan smart city di Kota Magelang pada periode 2017-2019. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, tapi juga pada dinamika proses, interaksi antar aktor dan konteks institusional yang melatarbelakanginya.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yaitu pejabat Bappeda Kota Magelang yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan smart city. Informan ini dipilih secara purposive karena memiliki posisi strategis dan pemahaman menyeluruh terhadap tahapan formulasi kebijakan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi RPJMD, masterplan smart city Kota Magelang, laporan monitoring dan evaluasi, serta beberapa literatur dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan lokasi penelitian di Pemerintah Kota Magelang dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait tahapan formulasi kebijakan, peran aktor, serta mekanisme koordinasi yang terjadi selama proses perumusan. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara dan untuk memahami kerangka formal kebijakan yang ditetapkan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan dokumentasi ditranskripsikan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan kerangka teori formulasi kebijakan dan pemetaan stakeholder. Selanjutnya data dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan konsep-konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan literatur yang relevan. Kemudian dilakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diperoleh untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Tujuan	Data yang akan diperoleh
1	Dionisius Hariwibowo, ST., M. Eng.	Bappeda Kota Magelang KA. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	Untuk mengetahui peran antar aktor formal yaitu aktor legislatif dalam proses formulasi kebijakan Smart City Kota Magelang	Peran aktor formal (aktor-aktor legislatif) dalam proses formulasi kebijakan Smart City Kota Magelang

Hasil dan pembahasan

Pembahasan 1

Berdasarkan Masterplan smart city Kota Magelang, pengembangan smart city dilaksanakan melalui enam dimensi utama, yaitu Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment. Keenam dimensi tersebut menjadi kerangka utama dalam melakukan perencanaan dan pengembangan berbagai program smart city di Kota Magelang. Program-program yang dikembangkan antara lain aplikasi Magelang Cerdas, sistem e-retribusi Bakul Pasar dan beberapa inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam perumusan kebijakan smart city yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai program prioritas pemerintah daerah.

(Sumber : Masterplan Smart City Kota Magelang)

Pembahasan 2

PERUMUSAN MASALAH DAN AGENDA KEBIJAKAN

PERUMUSAN MASALAH

Identifikasi Permasalahan

Menurut hasil wawancara, proses perumusan masalah dalam Magelang Smart City berangkat dari visi Kota Magelang yang memuat kata 'Cerdas'.

"Jadi, di RPJM Pak Wali sebelumnya, Pak Sigit, di situ sudah menjelaskan tentang salah satu visinya cerdas. Kemudian Pemda berusaha mencari indikator apa yang bisa untuk mengukur visi cerdas. Kebetulan ITB menerapkan pengukuran, membuat pemodelan *Smart City* lalu bekerja sama dengan mereka, ITB yang me-rating tingkat kematangan *Smart City* di Indonesia saat itu."

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Magelang bersama dengan Bappeda Kota Magelang dan beberapa dinas terkait seperti Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan ITB membahas mengenai roadmap dari Kebijakan Magelang Smart City. Hasilnya bahwa Kota Magelang dapat dikatakan kota Smart dalam

kelompok Smart City level tinggi untuk kategori kota kecil dengan jumlah penduduk dibawah 200 ribu jiwa.

“Kita kerja sama dengan mereka, bikin *roadmap*-nya dari hasil *rating*-nya mereka, kita waktu itu sudah masuk *smart* dalam kelompok *Smart City* level tinggi untuk level kota kecil di bawah 200 ribu penduduk tahun 2015. *Roadmap*-nya dibuat 2016 bekerja sama dengan ITB.”

Sumber : wawancara dengan bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Pemerintah Kota Magelang membuat tim perancang Kebijakan Magelang Smart City yang terdiri dari Bappeda Kota Magelang, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, dan beberapa dinas terkait serta ITB sebagai pihak akademisi. Berbagai *stakeholder* dan aktor perumus kebijakan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap permasalahan yang ada di Kota Magelang. Penelitian dilakukan tiap dua tahun sekali. Mereka merumuskan permasalahan yang ada di Kota Magelang, kemudian disesuaikan dengan kondisi ideal dalam berbagai dimensi yang telah dibahas dalam Garuda Smart City. Dari sini kemudian dihasilkan beberapa prioritas permasalahan dan dimasukkan dalam *roadmap*.

Pada tahap ini juga dibahas rencana-rencana yang akan dicapai lima tahun kedepan dan rencana jangka panjangnya. *Roadmap* tersebut dimasukkan dalam RPJMD dan RPJPD Kota Magelang. Sebagai transparansi, pemerintah Kota Magelang bekerja sama dengan media pers seperti Metro dan Kompas untuk menyampaikan informasi terkait perkembangan proses formulasi kebijakan Magelang Smart City.

“*Roadmap* dibuat 2016 bekerja sama dengan ITB. Mereka juga bekerja sama dengan Metro dan Kompas.”

Sumber : wawancara dengan bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Identifikasi permasalahan di Kota Magelang sebagai berikut :

Tabel 3.1 Permasalahan di Kota Magelang

No	Permasalahan
1	Letak Kota Magelang yang strategis dilewati jalur utama Semarang-Yogyakarta menyebabkan Kota Magelang tumbuh menjadi simpul jalur ekonomi dan wisata regional. Hal tersebut menjadi potensi dan daya tarik bagi Kota Magelang
2	Tingkat aksesibilitas yang tinggi menyebabkan pertumbuhan kawasan perdagangan, jasa, dan industri menjadi sangat cepat.
3	Pesatnya pertumbuhan Kota Magelang sebagai kota perdagangan, jasa, dan industri memberikan dampak pada tingginya jumlah penduduk yang mendiami Kota Magelang.
4	Tingginya kepadatan penduduk
5	Ketersediaan fasilitas pelayanan yang kurang menjangkau seluruh penduduk
6	Tingginya tingkat kemacetan
7	Tingginya lahan terbangun

Sumber : Masterplan Smart City Kota Magelang

Identifikasi Aktor (*Stakeholders*) dalam Perumusan Masalah

3Aktor *State*

Berdasarkan hasil wawancara, aktor *state* dalam proses perumusan masalah terdiri dari Walikota Magelang, Sekretaris Daerah, Bappeda, Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan beberapa dinas yang terkait lainnya.

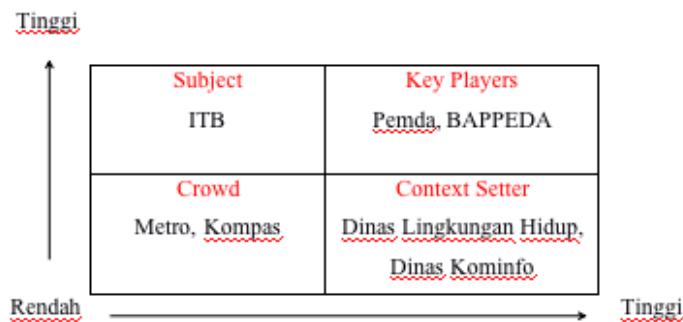
Interaksi Antar *Stakeholders* dalam Perumusan Masalah

Stakeholders Primer

Walikota Magelang merupakan *stakeholders* primer. Walikota Magelang merupakan aktor yang langsung berdampak, baik dampak positif maupun negatif pada saat proses perumusan masalah.

Teknik Pemetaan *Stakeholders* dalam Perumusan Masalah

Analisis *stakeholders* dalam proses perumusan masalah Kebijakan Magelang Smart City adalah sebagai berikut.



Hasil pemetaan *stakeholders* menunjukkan bahwa Walikota dan Bappeda berada pada kuadran *player* karena memiliki kekuatan dan kepentingan yang tinggi dalam proses formulasi kebijakan smart city

“Yang bertanggung jawab itu Bappeda bekerja sama dengan ITB sebagai perencanaan, lalu ada Kominfo. Tahun 2020-2021 peralihan, untuk tahun 2021 dan seterusnya diserahkan ke Kominfo yang bertanggung jawab”

Sumber : wawancara dengan bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kominfo menempati kuadran *context setter*. Pada kuadran *subject*, aktor yang menempati kuadran tersebut adalah ITB sebagai pihak akademisi. Selanjutnya, media pers Metro dan Kompas sebagai aktor *private* berada pada kuadran *Crowd*.

Peran Masing-Masing *Stakeholders* dalam Perumusan Masalah

Walikota Magelang merupakan *policy creator*, yaitu *stakeholders* yang memiliki kewenangan sebagai pengambil keputusan. Sedangkan Bappeda Kota Magelang sebagai aktor koordinator mempunyai kepentingan dalam menjamin perencanaan dan pembangunan yang ada di daerah. Sedangkan ITB sebagai aktor akademisi yang berkepentingan dalam isu-isu publik. *Stakeholder* pendukungnya yaitu media pers Metro dan Kompas berperan

sebagai *fasilitator*. Kemudian dilakukan FGD (*Forum Group Discussion*) untuk mencapai kesepakatan bersama terkait penentuan prioritas masalah.

Analisis Kritis

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Bappeda memiliki peran yang sangat dominan dalam proses formulasi kebijakan smart city di Kota Magelang. Dominasi ini tidak terlepas dari posisi Bappeda sebagai lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan program strategis berbasis inovasi seperti smart city. Selain faktor kelembagaan, koordinasi lintas perangkat daerah juga cenderung terpusat pada Bappeda sehingga proses pengambilan keputusan lebih banyak berada dalam kendali instansi tersebut.

Namun, dominasi aktor pemerintah dalam proses formulasi kebijakan juga memiliki implikasi terhadap terbatasnya ruang partisipasi masyarakat. Secara konseptual, smart city menekankan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, swasta dan komunitas. Dalam praktiknya, keterlibatan aktor non pemerintah dalam formulasi kebijakan smart city di Kota Magelang masih relatif terbatas dan lebih bersifat konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan smart city masih cenderung bersifat state-centric, dimana pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan.

AGENDA KEBIJAKAN

Penetapan Prioritas Masalah

Berdasarkan wawancara, proses formulasi selalu dilakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) setiap tahunnya. Tahap agenda kebijakan dilakukan dengan FGD (*forum group discussion*) yang khusus membahas mengenai perumusan Kebijakan Magelang Smart City. Hasil rencana kerja (*renja*) dari seluruh SKPD dibahas bersama-sama dalam FGD tersebut. *Monev* dilanjutkan ke seluruh OPD baik dinas-dinas terkait dan seluruh *stakeholder* baik aktor dari dalam dan aktor luar yang terlibat.

“Setiap tahun ada *monev*. Kita juga ada di tahap, misal perencanaan kerja (*renja*) dari KPD kami melakukan FGD (*focus group discussion*) tentang *Smart City*. Hasil *monev* kita lempar ke OPD dinas dan *stakeholder* yang di luar.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Stakeholder di luar pemerintahan yang terlibat terkait teknologi ada STMIK Bina Patria, dari pihak Universitas yang di Magelang ada Untid dan UMM. Kelompok masyarakat yang bergerak dibidang IT seperti kampung IT dan kampung *blogger* juga ikut berpartisipasi.

“Di sini yang terkait teknologi ada STMIK Bina Patria, Untidar, UMM, ada juga dari masyarakat yang bergerak di IT, kampung *blogger*, kampung IT, semua kita hadirkan.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Kampung IT berperan secara aktif dalam mensosialisasikan terkait teknologi digital kepada masyarakat. Kampung IT mempunyai tim khusus yang bertugas dalam pengembangan dan pengenalan teknologi digital serta berupaya menumbuhkan inovasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong perekonomian masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN dan BUMD juga ikut dilibatkan dalam proses agenda kebijakan. Begitu juga aktor swasta seperti Telkom dan PLN serta CSR juga ikut berpartisipasi. *Monev* dan rencana kerja dibahas bersama-sama dalam FGD dengan melibatkan aktor-aktor dan stakeholder tersebut. Dalam FGD juga dibahas apa saja yang akan dicapai dalam satu tahun kedepan, apa saja yang telah dicapai, serta pencapaian apa saja yang masih perlu dilakukan perbaikan.

“Kita adakan FGD. Kemudian dari hasil *monev*, program kerja kita sajikan untuk meminta masukan dari mereka.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Apabila terdapat kondisi suatu wilayah yang sudah mampu menerima perubahan lebih cepat, akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan secepatnya. Agenda kebijakan dalam tahap ini berbentuk *roadmap* FGD Smart City yang dibahas bersama aktor-aktor terkait seperti dinas-dinas, *stakeholders*, dan pihak-pihak luar atau swasta yang ikut berperan seperti PLN dan Telkom.

“Misalnya, *monev* direncanakan tahun sekian, bisa maju di tahun ini. Agendanya dalam bentuk *roadmap*, awal masa siklus perencanaan diadakan FGD terkait *Smart City*, kita cari masukan-masukan dari dinas, *stakeholder*, pihak yang ikut berperan ada PLN, Telkom.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Tabel 3.2 Prioritas Permasalahan di Kota Magelang

No	Permasalahan Pokok
1	Belum memiliki web service sehingga belum support interoperabilitas data
2	Aplikasi masih sektoral, belum terintegrasi dalam satu portal.
3	Kurangnya informasi yang tersedia dalam layanan publik tersebut.
4	Kurangnya aksesibilitas masyarakat ke layanan tersebut.
5	Biaya akses yang lebih mahal dan lama apabila tidak menggunakan portal satu pintu.
6	Dampak dari pemasukan retribusi daerah ke dalam pendapatan daerah sangatlah besar sehingga perlu berbagai cara untuk meningkatkan realisasi pendapatan tersebut
7	Keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Sumber : Masterplan Smart City Kota Magelang

Identifikasi Aktor (*Stakeholders*) dalam Agenda Kebijakan

Aktor State

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah Kota Magelang merupakan aktor *state* sekaligus aktor primer. Aktor *state* dalam proses

agenda kebijakan Magelang Smart City terdiri dari Bappeda Kota Magelang sebagai aktor utama dan Dinas Kominfo sebagai aktor yang ikut dalam mengkoordinasikan.

Aktor Private

Berdasarkan hasil wawancara, aktor *private* yang ikut terlibat terkait teknologi ada STMIK Bina Patria, pihak Universitas ada Untid dan UMM. Kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN dan BUMD, begitu juga aktor swasta seperti Telkom dan PLN serta CSR

Aktor Society (Masyarakat)

Aktor masyarakat (*society*) yang ikut terlibat yaitu kelompok masyarakat IT seperti kampung IT dan kampung *blogger*.

Interaksi Antar Stakeholders dalam Agenda Kebijakan

Stakeholders Primer

Menurut hasil wawancara, pemerintah daerah Kota Magelang merupakan *stakeholders primer*. Bappeda Kota Magelang merupakan aktor yang secara langsung bertanggung jawab pada saat proses agenda kebijakan. *Stakeholders primer* yang lainnya yaitu Dinas Kominfo dan beberapa dinas-dinas terkait lainnya.

Stakeholders Pendukung (Sekunder)

Berdasarkan hasil wawancara, *stakeholder* pendukung terkait teknologi ada STMIK Bina Patria, dari pihak Universitas ada Untidar dan UMM. Perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN dan BUMD, aktor swasta seperti Telkom dan PLN serta CSR lain yang terkait.

"Komunitas ada kampung IT, kampung *blogger*. Perusahaan-perusahaan yang besar misalnya BUMN, Telkom, PLN. Perbankan juga. Apa yang bisa disumbang, mereka bisa ikut berperan untuk mencapai tujuan-tujuan agenda yang ada di *roadmap*."

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Stakeholders Kunci

Menurut hasil wawancara, *stakeholder* kunci dalam proses agenda Kebijakan yaitu Bappeda Kota Magelang dan Dinas Kominfo Kota Magelang.

Teknik Pemetaan Stakeholders dalam Agenda Kebijakan

Analisis *stakeholders* dalam proses Agenda Kebijakan Magelang Smart City adalah sebagai berikut.



Pada kuadran *player*, Bappeda dan Dinas Kominfo memiliki tingkat interest dan kekuatan yang paling tinggi sehingga dapat dimasukkan dalam kuadran *player* dalam penyusunan rencana atau program terkait Magelang Smart City. Kuadran *context setter*, ditempati oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan. Pada kuadran *subject*, ditempati pihak universitas di Magelang yaitu Untid dan UMM. Pada kuadran *Crowd*, ditempati oleh perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN dan BUMD. Kemudian stakeholder swasta seperti PT Telkom dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Peran Masing-Masing Stakeholders dalam Proses Agenda Kebijakan

Menurut hasil wawancara, Bappeda Kota Magelang merupakan *policy creator*. Bappeda juga berperan sebagai *koordinator* yang mengkoordinasikan *stakeholders* lain. Disini Bappeda dibantu oleh Dinas Kominfo. *Stakeholder* pendukung disini yaitu PT. Telkom, dan PT. PLN yang berperan sebagai *fasilitator*. Stakeholders akademisi seperti ITB, Untid, UMM, STMIK Bina Patria sebagai aktor akademisi merupakan aktor intelektual dalam pengawasan kebijakan pemerintah.

Masyarakat (*society*) berperan sebagai *implementator*. Kelompok masyarakat yang terlibat seperti Kampung IT dan Kampung Blogger yang berperan secara aktif dalam mensosialisasikan teknologi digital kepada masyarakat. Sedangkan FGD (*Forum Group Discussion*) dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Pembahasan 3

PEMILIHAN ALTERNATIF KEBIJAKAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PEMILIHAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

Pemilihan Alternatif untuk Memecahkan Masalah

Berdasarkan wawancara, proses pemilihan alternatif Kebijakan dilakukan dengan membuat rencana planning yang terdiri dari plan A, plan B, dan plan C sebagai pilihan alternatif kebijakan. Para perumus kebijakan melihat situasi dari *monev*. Selain itu juga dilihat dari roadmap, situasi *existing* di daerah dan lingkungan sekitarnya seperti apa, termasuk situasi

dan kondisi teknologi di daerah yang merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan *Smart City*. Kemudian juga dilihat kaitannya dari segi regional, nasional dan yang lainnya.

“Ada *plan A*, *plan B*, *plan C*. Saat penyusunan perencanaan FGD, lihat situasi dari *move*, dari *roadmap*, situasi *eksisting* di daerah dan sekitarnya, misalnya dari regional, dari nasional dan macam-macam, misalnya kondisi teknologi seperti apa.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Setelah itu dimasukkan dalam tiga opsi yaitu opsi optimis, opsi pesimis, dan opsi normal. Antara tiga opsi tersebut sangatlah berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Setiap pemilihan tindakan opsi optimis maka akan mempengaruhi pemilihan tindakan yang harus dilakukan untuk opsi normal dari suatu daerah. Sedangkan jika opsi dari suatu daerah adalah normal, tentu akan ada yang pesimis. Opsi pesimis artinya masih banyak unsur yang belum pasti.

“Ada beberapa opsi, misalnya opsi optimis nya, opsi normalnya, kalau ternyata pesimis, ada tiga yang yakin bisa itu yang apa. Nanti kalau misalnya normal-normal saja, nanti juga ada yang pesimis, jadi pesimis itu masih banyak unsur tidak pastinya.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Opsi pesimis mengarah pada hal-hal yang memang sangat tergantung pada kondisi luar yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya terkait regulasi E-Retribusi, apabila segala persyaratan untuk melakukan kebijakan tersebut yakin bisa untuk dilakukan maka optimis bisa.

“Misalnya E-Retribusi, jika segala kondisi persyaratan untuk melaksanakan yakin bisa berarti optimis. Tapi jika *vintage* regulasinya belum jelas, sebenarnya belum ada di sini seperti *working space*.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Namun, misalnya jika *vintage* regulasinya belum jelas, *working space* yang belum jelas akan dimana, seperti apa, penanggung jawab siapa apakah dinas tenaga kerja, atau dinas komistra, ataupun dinas perizinan, dan sebagainya. Maka dapat dikatakan kebijakan tersebut belum begitu jelas terkait regulasinya sehingga pilihannya antara pesimis atau normal.

Identifikasi Aktor (*Stakeholders*) dalam Alternatif Kebijakan

Aktor State

Berdasarkan hasil wawancara, aktor *state* yaitu pemerintah Kota Magelang, Bappeda Kota Magelang, Dinas Kominfo dan beberapa dinas lain.

Interaksi Antar *Stakeholders* dalam Alternatif Kebijakan

Stakeholders Primer

Stakeholders primer disini yaitu Sekretaris Daerah, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Perkotaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, dan beberapa dinas lain yang terkait.

Stakeholders Kunci

Stakeholder kunci disini yaitu Bappeda Kota Magelang divisi perencanaan.

Teknik Pemetaan *Stakeholders* dalam Alternatif Kebijakan

Analisis stakeholders dalam proses Pemilihan Alternatif Kebijakan Magelang Smart City adalah sebagai berikut.



Bappeda memiliki tingkat interest dan kewenangan yang sangat tinggi sehingga dapat dikelompokkan sebagai *player* dalam proses Pemilihan Alternatif Kebijakan. Kuadran *context setter* ditempati Dinas Lingkungan Hidup dan Perkotaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kominfo. Pada kuadran *subject* dan *crowd* tidak ada aktor atau stakeholder yang menempati kuadran tersebut.

Peran Masing-Masing *Stakeholders* dalam Alternatif Kebijakan

Bappeda Kota Magelang sebagai aktor pemerintahan mempunyai kepentingan dalam menjamin segala perencanaan dan pembangunan yang ada di daerah. Sedangkan Dinas Kominfo dan dinas-dinas lain mempunyai kepentingan dalam memberikan pelayanan publik. FGD (*Forum Group Discussion*) dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama terkait penentuan permasalahan yang dimasukkan dalam agenda kebijakan untuk diselesaikan.

Pembahasan 4

PENETAPAN KEBIJAKAN

Penetapan Kebijakan Magelang Smart City

Berdasarkan hasil wawancara, proses penetapan Kebijakan Magelang Smart City dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang sebagai aktor state dan aktor utama. Setelah dilakukan FGD, kemudian kebijakan-kebijakan yang telah disepakati diserahkan kepada pemerintah Kota Magelang.

“Setelah di SKPD, kebijakan-kebijakan terkait *Smart City* diterima semua, kami akan melaksanakan kegiatan tersebut untuk mendukung *Smart City*. Ada komitmen masing-masing melaksanakan apa.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Pada tahap ini juga dilakukan pendanaan terkait kebijakan-kebijakan yang telah disepakati. Pada tahap penyusunan APBD baru dapat dilihat pihak-pihak yang dapat mensukseskan atau mendukung kebijakan

Magelang Smart City. Apabila dalam perundingan ini ternyata dana yang disediakan tidak cukup, maka akan dilakukan pengurangan kegiatan yang mempunyai dampak yang kurang signifikan.

“Di APBD akan terlihat pihak pro kegiatan, apakah dananya mencukupi atau tidak. Kalau tidak, ada yang dikurangi.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Pada saat pengurangan rencana kebijakan, diharapkan tidak mengubah atau berdampak pada indikator pencapaian Kebijakan Magelang Smart City.

“Pas saat pengurangan, harapannya tidak berdampak pada indikator pencapaian *Smart City*, kalau ada yang terdampak menjadi catatan di perubahan.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Pada tahap ini suatu kebijakan yang telah disepakati dicoba untuk disandingkan antara perencanaan yang telah dibuat dan disepakati dengan kenyataan dan dukungan anggaran yang ada. Pada tahap ini juga dilihat apakah kebijakan tersebut mampu dilaksanakan atau harus ditunda terlebih dahulu. Apabila ditunda apakah hanya jangka pendek atau harus ditunda hingga tahun berikutnya.

“Kita coba bandingkan antara perencanaan dengan kenyataan dan dukungan anggaran yang ada, bisa lanjut atau harus *pending*. Apakah bisa di-*pending* setengah tahun atau ke tahun berikutnya. Kalau *pending* setengah tahun berarti ada perubahan anggaran.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Jika semua tahap tersebut lolos dan kebijakan dinyatakan telah disepakati, maka akan dimasukkan dalam peraturan walikota. Peraturan walikota tersebut akan dibahas bersama dengan dewan dalam rapat. Peraturan walikota berisi peraturan rencana kerja, sedangkan APBD menjadi peraturan daerah atau perda.

“Setelah di sana lolos semua, peraturan walikota dirapatkan dengan dewan. Di peraturan walikota tentang peraturan rencana kerja, kemudian APBD menjadi perda. Jika perencanaannya di peraturan walikota, APBD dibahas dengan dewan jadi peraturan daerah.”

Sumber : wawancara dengan Bapak Dion Bappeda Kota Magelang pada Juni 2021

Identifikasi Aktor (*Stakeholders*) dalam Penetapan Kebijakan

Aktor State

Aktor state dalam proses Penetapan Kebijakan terdiri dari Walikota Magelang, Sekretariat daerah, Bappeda, Dinas Kominfo dan dinas-dinas terkait lainnya.

Interaksi Antar *Stakeholders* dalam Penetapan Kebijakan

Stakeholders Primer

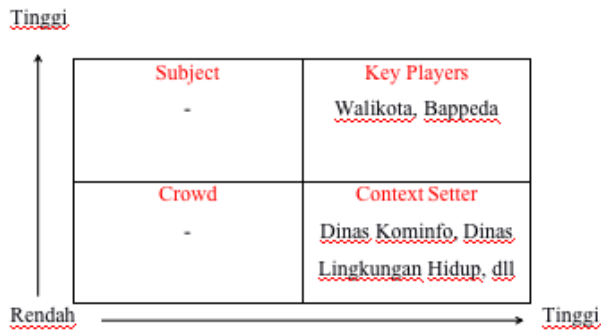
Stakeholders primer dalam proses penetapan kebijakan Magelang Smart City yaitu Walikota Magelang, Sekretaris Daerah, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Perkotaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo.

Stakeholders Kunci

Stakeholder kunci dalam proses Penetapan Kebijakan Magelang Smart City yaitu Pemerintah Walikota Magelang.

Teknik Pemetaan *Stakeholders* dalam Penetapan Kebijakan

Analisis stakeholders dalam proses Pemilihan Alternatif Kebijakan Magelang Smart City adalah sebagai berikut.



Pemerintah Walikota Magelang selaku aktor *eksekutif* memiliki tingkat interest dan kekuatan yang paling tinggi sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *player*. Kemudian Bappeda juga mempunyai interest dan kekuatan yang tinggi meskipun kedudukannya dibawah Walikota Magelang. Pada kuadran *context setter*, ditempati oleh beberapa dinas yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kominfo. Pada kuadran *subject* dan *crowd*, tidak ada aktor atau stakeholder yang menempati kuadran tersebut.

Peran Masing-Masing *Stakeholders* dalam Penetapan Kebijakan

Walikota Magelang merupakan *policy creator* yang berperan sebagai pengambil keputusan. Sedangkan Bappeda bidang perencanaan mempunyai peran sebagai *koordinator*. Dinas Kominfo mempunyai kepentingan dalam memberikan pelayanan publik. Setelah itu dilakukan FGD (*Forum Group Discussion*). Dari sini kemudian dihasilkan kesepakatan bersama terkait pendanaan dan RPJMD serta RPJPD Kota Magelang yang selanjutnya kebijakan Smart City tersebut dapat dilaksanakan dan diimplementasikan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, proses formulasi kebijakan smart city di Kota Magelang pada periode 2017-2019 berlangsung melalui empat tahapan utama, yaitu perumusan masalah (*defining problem*), penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Proses tersebut melibatkan berbagai aktor dan stakeholders, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Namun dalam praktiknya, Bappeda Kota Magelang memiliki peran yang sangat dominan sebagai koordinator yang mengarahkan proses perumusan kebijakan serta mengkoordinasikan berbagai perangkat daerah yang terlibat.

Dominasi Bappeda dalam proses formulasi tersebut menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan smart city di Kota Magelang masih cenderung bersifat state-centric, dimana pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan, perbedaan kepentingan antar aktor diselesaikan melalui forum diskusi seperti Focus Group Discussion (FGD) yang berfungsi sebagai ruang koordinasi dan pencapaian kesepakatan bersama.

Secara teoritis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep smart city di tingkat pemerintah daerah tidak selalu berjalan melalui model tata kelola yang kolaboratif sebagaimana yang banyak dibahas dalam literatur smart city. Dalam praktiknya, proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh aktor pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat dalam tahap perumusan kebijakan belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal smart city yang menekankan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dengan praktik kebijakan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, pengembangan kebijakan smart city di masa mendatang perlu mendorong keterlibatan yang lebih luas dari berbagai aktor, termasuk masyarakat, sektor swasta, komunitas, dan akademisi. Keterlibatan tersebut penting tidak hanya untuk memperkuat legitimasi kebijakan, namun juga untuk memastikan bahwa kebijakan smart city yang dirumuskan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian kebijakan publik, khususnya terkait proses formulasi kebijakan smart city di tingkat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep smart city sering dipahami sebagai pendekatan pembangunan kota yang kolaboratif dan partisipatif, dalam praktiknya proses formulasi kebijakan masih cenderung didominasi oleh aktor pemerintah. Temuan ini memperkaya literatur mengenai smart city dengan menunjukkan bahwa dimensi tata kelola kebijakan masih menjadi faktor penting dalam menentukan arah pengembangan smart city di daerah.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang hanya berfokus pada proses formulasi kebijakan periode 2017-2019. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam tahap implementasi kebijakan smart city setelah periode tersebut, terutama setelah adanya perubahan kewenangan dari Bappeda kepada Dinas Kominfo. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi dan evaluasi kebijakan smart city di Kota Magelang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Bappeda, mulai membuka ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat, sektor swasta, dan komunitas

lokal. Saat ini, proses perumusan kebijakan masih terlalu terpusat (*state-centric*), sehingga kurang melibatkan aktor non-pemerintah secara aktif.

Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, tidak hanya melalui FGD formal, tetapi juga dengan memfasilitasi forum komunikasi yang lebih rutin dan terbuka. DPRD sebagai lembaga legislatif diharapkan turut berperan aktif dalam mengawal aspirasi publik dan mendorong pengawasan kebijakan secara kritis. Kepada komunitas, akademisi, dan pelaku usaha, penting untuk lebih aktif memanfaatkan platform digital dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kementerian dan lembaga pusat juga diharapkan mendampingi kota kecil seperti Magelang agar pengembangan Smart City tetap inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Melalui kerja sama lintas aktor yang lebih kuat dan terbuka, diharapkan kebijakan Smart City di Kota Magelang dapat menjadi inovasi yang benar-benar berdampak luas bagi masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Saya sebagai peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada para stakeholder yang menjadi objek dalam penelitian mengenai formulasi kebijakan Magelang Smart City. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Bappeda Kota Magelang, yang telah membuka akses informasi dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami secara langsung dinamika perumusan kebijakan. Terima kasih juga disampaikan kepada Wali Kota Magelang dan perwakilan DPRD Kota Magelang atas kesediaannya menjadi narasumber serta memberikan perspektif kebijakan yang sangat berharga.

Saya juga mengapresiasi partisipasi dari komunitas lokal seperti Kampung Blogger Magelang yang memberikan sudut pandang dari sisi masyarakat dalam pembangunan kota cerdas. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi seluruh pihak dalam mewujudkan Smart City Magelang yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penulis berharap kolaborasi antar aktor yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi kemajuan Kota Magelang di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Bryson, Jhon M. 2004. *What Do When Stakeholders Matter: Stakeholders Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubbert H. Humphrey Institute Of PublicAffairs
- Dalias. 2017. *Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan MalioboroSebagai Kawasan Semi Pedestrian*. Yogyakarta : UGM

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice, Hall.
- Greenstein, Fred I dan Nelson W. Polsby. 1975. *Handbook of Political Science: Micropolitical Theory*. Addison Wesley Publishing Company.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hartarto, Landrikus S. 2016. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta di Provinsi DKI Jakarta*. JIP Universitas Padjadjaran
- Hasibuan, Abdurrozzaq & Krianto, Oris S. 2019. *Smart City, Konsep Kota cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatra Utara*. Buletin Utama Teknik Vol. 14, No. 2
- Indrayana, Guntur. 2016. *Good Governance dan Kebijakan Publik (Studi atas Penerapan Jakarta Smart City Melalui Aplikasi QJUE Tahun 2016)*. Laman: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42915/1/GUNTUR%20INDRAYANA-FISIP.pdf>
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. Yogyakarta
- Lail, Lutfianah (2017) *Implementasi Kebijakan Smart City di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Marshall, C. dan Gerstl-Pepin, C. (2005). *Re-Framing Educational Politics for Social Justice*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Meijer, Albert & Bolivar, Manuel P Rodrigues. 2015. *Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance*. Sage Journal. Laman: <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Nugroho, Hermawan cahyo et al. 2014. *Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Pembangunan dan Lestari Alam. Vol.5 No.2
- Purnama, Ridwan dan Sulastris. 2014. *Analisis Model Kekuatan Stakeholder dalam Desain Dan Implementasi Kebijakan UPI*. Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis. Vol.5
- Putri, Ade M. 2016. *Persiapan Kota Makassar Sebagai Smart City*. Laman : <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20493/SKRIPSI%20ADE%20PUTRI%20MANGULUANG.pdf?sequence=1>
- Rahmadanita, Annisa. 2018. *Implementasi Kebijakan Smart Government dalam Rangka Mewujudkan Smart City di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. vol 44 no 2
- Rizka, Olyvia. 2017. *Implementasi Smart City Di Kota Malang*. Laman : <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ekonomipembangunan/article/view/6298>
- Utami, Tiara. 2014. *Aktor-Aktor Kebijakan Publik dalam Pemerintahan*. Laman :

<https://www.academia.edu/9125600/>

Widharetno, Siti M. 2017. *Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi vol 14 no 1

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. PT. Buku Seru

Biografi Singkat Penulis



Sinta Silfiani, S.IP. lahir di Magelang pada 4 Februari 1999. Telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Program Studi Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, dengan IPK 3,71. Saat ini tengah melanjutkan studi di Program Magister Administrasi Publik UGM.

Selama masa studi, aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti BEM Fakultas, KOMAP, dan Teater Selasar Fisipol. Pengalaman kerja di sektor publik, termasuk sebagai Asisten Consumer Loan Officer di Bank BTN dan enumerator riset di PolGov UGM, membentuk minat saya dalam bidang kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian skripsi ini merupakan bagian dari komitmen saya untuk mengkaji perumusan kebijakan inovatif di tingkat daerah, khususnya dalam implementasi Smart City di Kota Magelang.